

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Achmad Ali & Wiwie Heryani, 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Chaidir Ali, 1993. *Hukum Pajak Elementer*, Eresco, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Elisabeth Nurhairani Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)*, Bandung: Refika Aditama.
- Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo, 1997, *Perpajakan Edisi 4*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Marihot, 2003, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktik*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Mukti Fajar Nurdewata, 2010, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Philipus M. Hadjon et al, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Rochmat Soemitro, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung: Eresco

Safrinurmana, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Obor Indonesia.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

W.J.S Peowadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka: Jakarta, hal.847.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 1999, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

2. Jurnal

Eka Susanti, 2020, *Problematisasi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Di Kota Padang*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.5 No 2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh

Fika Agusti, Asri, 2008, *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama*. Jurnal Pada Simposium Akuntansi Nasional Vol.12.

Hendra Cermana, "Sistem Self Assesment Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Berbasis Estimasi Di Kota Bandung Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum", Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung.

Mulyono, M., Tampubolon, M. and Butarbutar, S., 2024. *Perbandingan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak di Amerika Serikat, Australia dan Indonesia*. Jurnal Syntax Admiration, Vol.5(7), Hlm.2825-2840.

Putri, D.V.A., Haidar, A.J., Irfansyah, F.F.B. and Hakim, M.L., 2024. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Sengeketas Pajak*. Jurnal Kritis Studi Hukum, Vol.9(5).

Sapiel, Noor Sharoja, Jeyapalan Kasipillai, 2013, *Impects Of The Self-Assessment System For Corporate Tacpayers*, American Journal of Economics. Vol.3.(2).

Tarjo dan Indra Kusumawati, 2006. *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi Di Bangkalan*, JAAI Volume 10, No. 1.

Yusuf, M., 2024. *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari*. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 4(1), hlm. .97-115

3. Website

Anonym, www.pengertianmenurutaraahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum?/,

Gramedia.com, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

Layanan F. Hukum UNS, Teori Kepastian Hukum, <https://layanan.hukum.uns.ac.id>

4. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Maros nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.